

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Djaja, Ermansyah *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika, Balikpapan, 2008.
- Faisal Salam, Moch, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Freddy Susanto, Anton , *Wajah Peradilan Kita Kontribusi Sosial Tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntanilitas Peradilan Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanitjo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Harahap, Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penyalidikan*, Ed. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I dan Jilid II)*, Pustakan Kartini, Jakarta, 1998
- Hartanti, Evi, *Penyelidikan Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- \_\_\_\_\_, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ibrahim, Johny , *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2005.
- Loqman, Loebby, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta : Universitas Tarumanegara, 1996.
- M Pangaribuan, Luhut, *Hukum Acara Pidana*. Djambatan, Jakarta, 2008.

- M. Hussein, Harun, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2008.
- Marpaung, Leden *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009
- \_\_\_\_\_, Leden, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Muhammad, Rusli , *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007
- Nugroho, Hibnu, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011
- \_\_\_\_\_, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2012
- OS. Hiariej, Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta,
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cetakan 2. Sumur Bandung, Bandung, 1962
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010
- Riki Perdana Raya Waruwu, *Praperadilan Pasca 4 Putusan*, Artikel Hakim Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2017
- Seno Adji, Oemar, *Hukum, Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Setyawati, Deni, *KPK Pemburu Koruptor Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*, Yogyakarta:Pustaka Timur, 2008

Simanjuntak, Nikola , *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Sujana, Eggi, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, Surabaya: JP.Books, 2008.

Utrecht, E. dan Saleh Djindang, Moch, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1983.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

\_\_\_\_\_, Undang- Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

\_\_\_\_\_, Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Mahkamah Konstitusi,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014

\_\_\_\_\_,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/ PUU-XIII/2015

\_\_\_\_\_,Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XV/2017

Mahakah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

Kapolri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012)

### **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya:**

Ahmad Ardi Effendy, *Tinjauan Yuridis mengenai Penetapan Tersangka Sebagai Objek dalam Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Surabaya, Universitas Naraotama, 2015

Riki Perdana Raya Waruwu, *Praperadilan Pasca 4 Putusan*, Artikel Hakim Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2017

Gendis Wahyuningrum, *Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Atas Penghentian Penyidikan Atau Penuntutan dalam Perkara Korupsi*, JOM Fakultas Hukum Volum II Nomor 2, 2015

Randa Morgan Tarigan, *Sah Tidaknya Penetapan Status Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang Diajukan Sebagai Alasan Praperadilan Ditinjau dari Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi terhadap putusan nomor 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt.Sel-Praperadilan Budi Gunawan)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015

Ria Casmi Arrsa, *Urgensi Pembentuk KPK di daerah*, Jurnal Integritas (Jurnal Anti Korupsi), Volum 2 Nomor 1, 2016

Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Depkeh HAM RI, Jakarta, 2002

Chandra M. Hannah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi hukum dan Keblfakan Indonesia (MK), 2014

Rena Zefania Ritonga, Vicariya Retnowati Boong. *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume XVII No. 2. 2012

### **Internet dan Sumber Lainnya:**

Abba Gabrilin, *Menyoal Waktu Penetapan Tersangka KPK dalam Praperadilan Novanto*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/06244411/menyoal-waktu-penetapan-tersangka-kpk-dalam-praperadilan-novanto?page=all>, diakses pada (25 November 2017)

Dr. Chairul Huda., S.H.,M.H, *Pemahaman Tentang Alat Bukti Sebagai “Bukti Permulaan Yang Cukup” Dan Sebagai “Bukti Yang Cukup”* <http://huda->

[drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/09/pemahaman-tentang-alat-bukti-sebagai.html](http://drchairulhudashmh.blogspot.co.id/2015/09/pemahaman-tentang-alat-bukti-sebagai.html) 18 September 2015,

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  
<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205711002/bab3.pdf>, (20  
Februari 2018)